*- Kop surat -*

Jakarta, ... 2024

Hal : Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor … yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut …

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi**

**Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6**

**Jakarta Pusat**

Dengan hormat, bersama ini kami:

1. Nama : ..............................................................................

Alamat : ..............................................................................

nomor telepon/HP..............................................

email....................................................................

2. Nama : ..............................................................................

Alamat : ..............................................................................

nomor telepon/HP..............................................

email....................................................................

Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 Nomor Urut … Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor ... tanggal ... dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1) ...,

2) ...,

3) *dst*.

kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor ... yang beralamat di ... nomor telepon/HP ... *email*: ... Kartu advokat ... baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

Selanjutnya disebut sebagai-------------------------------------------**Pihak Terkait;**

Dalam hal ini memberi Keterangan Pihak Terkait dalam Perkara Nomor … yang diajukan oleh Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 Nomor Urut …, sebagai berikut.

1. **DALAM EKSEPSI** *(jika diperlukan dan bersifat alternatif)*
   1. **KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan:

1. bahwa...,
2. bahwa...,
3. *dst*.
   1. **KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON**

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan perselisihan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan umum Calon Presiden dan Wakil Presiden sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan:

1. bahwa...,
2. bahwa...,
3. *dst*.
   1. **TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**
4. Bahwa penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diumumkan oleh Termohon pada tanggal ... Dengan demikian, tenggang waktu 3 (tiga) hari setelah Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden oleh KPU untuk mengajukan permohonan adalah pada tanggal ... sampai dengan tanggal ...
5. Bahwa Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal ...
6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan Permohonan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
   1. **PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)**

Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan:

1. bahwa…,
2. bahwa…,
3. *dst*.
   1. **Eksepsilain** *(jika ada)*
4. **DALAM POKOK PERMOHONAN**
5. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:
6. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di … adalah tidak benar karena … berdasarkan bukti PT-... dan saksi ...
7. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi Pihak Terkait di ... adalah tidak benar karena … berdasarkan bukti PT-... dan saksi...
8. dst.
9. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai kesalahan perolehan suara di ..., menurut Pihak Terkait adalah keliru karena sesuai dengan hasil penghitungan di ... yang benar adalah sebanyak ... berdasarkan bukti PT-... dan keterangan saksi ...
10. dst*.*
11. Dengan demikian menurut Pihak Terkait adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang didalilkan oleh Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.
12. **PETITUM**

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI *(jika dalam posita mengajukan eksepsi)*

Menerima eksepsi Pihak Terkait.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor ... tentang … bertanggal ... 2024;
3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| No | Nama Pasangan Calon | Perolehan Suara |
| 1. | Pasangan Calon Nomor Urut … | ... |
| 2. | Pasangan Calon Nomor Urut … | ... |
| 3. | dst | … |
| **Total Suara Sah** | | ... |

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,  
**Pihak Terkait/Kuasa Hukum Pihak Terkait\***

1. Nama (tanda tangan)

2. Nama (tanda tangan)

*\*jika menggunakan kuasa hukum, Keterangan ditandatangani oleh kuasa hukum Pihak Terkait*

**CONTOH:**

**DAFTAR ALAT BUKTI PIHAK TERKAIT**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NO. | KODE BUKTI |  | URAIAN BUKTI |
| 1. | Bukti PT-1 | : | Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024; |
| 2. | Bukti PT-2 | : | Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penetapan Nomor Urut Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024; |
| 3. | Bukti PT-3 | : | Fotokopi Formulir Model C-1 TPS … Desa/Kelurahan … Kecamatan … Kabupaten/Kota …; |
| 4. | dst… |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Jakarta, …… 2024

Pihak Terkait/Kuasa Hukum